

KATA PENGANTAR

BKPM menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2011” mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja BKPM Tahun 2011. Di dalam laporan tersebut diuraikan hal-hal pokok mengenai pelaksanaan sasaran dan program BKPM sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV Akuntabilitas Kinerja.

Disamping uraian mengenai capaian kinerja periode pelaksanaan tahun 2011, diuraikan pula penjelasan mengenai perbandingan kinerja secara singkat khususnya untuk hal-hal yang bersifat pokok/penting yang menggambarkan keberhasilan capaian organisasi tahun 2011 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian laporan akuntabilitas ini, cukup menggambarkan peningkatan pencapaian sasaran dan program BKPM sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya di dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, serta Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKPM Tahun 2011.

Capaian realisasi penanaman modal yang merupakan *outcome (goal)* BKPM dalam rangka kontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, meningkat sangat signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra maupun bila dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun sebelumnya.

Perlu kami laporkan bahwa target realisasi penanaman modal yang ditetapkan oleh Kepala BKPM tahun 2011, yaitu sebesar Rp 240 triliun, telah terlampaui dengan capaian realisasi penanaman modal sebesar Rp. 251,3 triliun. Terdapat peningkatan capaian realisasi penanaman modal sebesar Rp. 11,3 triliun atau sebesar 4,7 %.

Disamping itu, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka penyebaran informasi potensi penanaman modal Indonesia dan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 31 Januari 2012

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kepala,



Gita Irawan Wirjawan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha merupakan salah satu prioritas dan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 di bidang penanaman modal, yang harus menjadi arah bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam empat tahun kedepan. Hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal).

Prioritas nasional di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI yaitu **"terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia"**.

Dalam tahun 2011, **terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing** ditandai dengan adanya 3 (tiga) survey pemeringkat internasional yaitu Moody's, Fitch, dan Standard & Poors telah memberikan peringkat "investment grade" bagi Indonesia, yang berarti bahwa kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia semakin meningkat, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya persepsi resiko melakukan penanaman modal di Indonesia.

Moody's memberikan peringkat Baa3, Fitch memberikan peringkat BBB-, Standard & Poors memberikan peringkat BB + bagi Indonesia. Keuntungan bagi Indonesia setelah mencapai peringkat investment grade antara lain :

1. Para investor global akan semakin tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, sehingga sektor riil akan semakin berkembang
2. Biaya pendanaan pembangunan akan berpotensi menurun, karena biaya imbal hasil penerbitan surat berharga Pemerintah RI bisa menjadi lebih rendah
3. Indonesia berpotensi menarik investor yang lebih berkualitas dan berjangka panjang

4. Perekonomian nasional diharapkan semakin meningkat.

Selanjutnya dunia usaha juga akan semakin berkembang karena adanya potensi penurunan biaya pendanaan pembangunan dan perluasan usaha, serta adanya banyak alternatif sumber pembiayaan. Sebagai dampaknya adalah semakin terbukanya penciptaan lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disamping itu Indonesia dimata investor masih merupakan negara yang menarik untuk tujuan penanaman modal. Hal ini didasarkan atas:

1. Situasi makroekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih.

Negara-negara di Eropa Barat yang sedang dilanda gonjang-ganjing ekonomi. Keadaan fiskal, moneter, dan politik yang belum pulih dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Selain itu Amerika Serikat belum terlihat adanya penyikapan terhadap beban utangnya sehingga ruang fiskalnya masih sempit. Rasio debt to GDP negara-negara barat pada kisaran 70% - 170%.

Keadaan ekonomi negara-negara tersebut berdampak pada sisi penanaman modal dan perdagangan. Investor akan merefigurasi portfolio yang lebih segar, salah satunya Indonesia, hal ini dikarenakan :

- Indonesia memiliki sustainability secara fiskal;
- Rasio debt to GDP sebesar 25% dan pada 3 tahun ke depan diperkirakan bisa mencapai 20%;
- Dari sisi moneter BI rates turun menjadi 6,25%, yang mengindikasikan laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik;
- Dari sisi skala ekonomi, Indonesia memiliki penduduk 240 juta, yang merupakan pasar yang besar. Pada 15 tahun ke depan, sekitar tahun 2025, Indonesia memiliki keunggulan profil demografi, di mana 60% penduduknya berada pada usia dibawah 29 tahun. Semakin muda usia penduduk, maka akan cenderung semakin konsumtif.
- Pendidikan semakin baik. Hal ini ditunjukkan ruang fiskal yang semakin besar untuk pendidikan, sekitar Rp 240 triliun.

2. Kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. GDP nominal Indonesia saat ini sebesar 820 miliar dolar atau Rp 8.000 triliun, sementara Singapura 220 miliar dolar, Malaysia 230 miliar dolar, dan Thailand 310 miliar dolar. GDP PPP Indonesia saat ini sebesar 1,1 triliun dolar dan ekspor Indonesia per tahunnya sekitar Rp 18 triliun.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 6,5% - 7,5% (riset dari Standard Chartered Bank). Artinya setiap tahun ada penambahan GDP sebesar Rp 8 – 9 triliun. Sehingga akumulasi pada tahun 2030, Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp 60 triliun. Ekspor Indonesia sekitar 30% dari PMTB atau Rp 18 triliun per tahunnya.

3. Adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sangat berkaitan erat dengan penanaman modal di wilayah tersebut. Landasan yang mendasari MP3EI adalah semangat pemerataan pembangunan, semangat pemerintah vs swasta dan klusterisasi pembangunan nasional. Adapun basis MP3EI adalah agro industri, energi, dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dilakukan dengan tiga strategi utama. Pertama, pengembangan potensi ekonomi (koridor Sumatera, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Papua-Maluku, koridor Jawa dan koridor Bali-Nusa Tenggara), dan difokuskan kepada pengembangan delapan program utama. Yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Strategi kedua perkuatan konektivitas nasional, serta ketiga perkuatan kemampuan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberhasilan BKPM dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari meningkatnya capaian realisasi penanaman modal yang sangat signifikan yaitu sebesar 251,3 triliun, dengan detail sebagai berikut :

1. Capaian realisasi penanaman modal dalam tahun 2011 mencapai Rp. 251,3 triliun terdiri dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 76,0 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 175,3 triliun, atau

sebesar 104,7% dari target yang ditetapkan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 240 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 sebesar Rp 208,5 triliun, maka terdapat peningkatan sebesar 20,5%. Pencapaian ini memberikan gambaran yang sangat positif bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional.

2. Capaian realisasi PMDN tahun 2011 sebesar Rp 76,0 triliun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 60,5 triliun, terdapat peningkatan sebesar 25,62%.
3. Capaian realisasi PMA tahun 2011 sebesar Rp 175,3 triliun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 148,0 triliun, terdapat peningkatan sebesar 88,45%.
4. Apabila capaian realisasi PMDN dibandingkan dengan PMA tahun 2010 dan 2011, maka diperoleh rasio PMDN terhadap PMA tahun 2010 sebesar 40,87 %, sedangkan rasio PMDN terhadap PMA tahun 2011 sebesar 43,35 %, yang berarti bahwa terjadi peningkatan rasio PMDN / PMA tahun 2011 sebesar 2,45 %.
5. Penyebaran realisasi penanaman modal di wilayah/koridor Jawa Tahun 2011 adalah sebesar 58,93%, atau terjadi penurunan sebesar 8,34% dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 67,27%. Sedangkan penyebaran realisasi penanaman modal keluar Jawa adalah sebesar 41,06% atau terjadi peningkatan sebesar 8,34% dari tahun 2010 yang sebesar 32,72%.
6. Penyebaran realisasi penanaman modal didasarkan atas 6 (enam) koridor ekonomi yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua – Maluku.

Keberhasilan BKPM juga dapat dilihat dari transparansi pelayanan penanaman modal yang bebas KKN, ditandai dengan adanya Survey Integritas yang dilakukan oleh KPK, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Hasil survey menunjukkan bahwa indeks integritas Badan Koordinasi Penanaman Modal mencapai angka 7.60 lebih tinggi dari indeks integritas nasional (IIN), dan juga lebih tinggi dari indeks integritas total pusat (IITP). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di BKPM **menempati peringkat 1 (satu) dan dinyatakan baik dan memuaskan.**

Jika dibandingkan dengan hasil survey KPK yang dilaksanakan dalam tahun 2010, terdapat peningkatan kualitas layanan yang semakin memuaskan, transparan dan bebas KKN. Dengan demikian terlihat ada perbaikan yang sangat signifikan dalam bidang layanan penanaman modal di BKPM.

Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BKPM Tahun 2010, dengan predikat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2008.

Kedepan BKPM akan tetap melakukan berbagai upaya agar target yang sudah ditetapkan dapat dicapai, antara lain melalui penyempurnaan kebijakan penanaman modal, peningkatan pelayanan, dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Jakarta, 31 Januari 2012
Badan Koordinasi Penanaman Modal

LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	1. Realisasi penanaman modal	Rp 240 triliun	Rp 251,3 triliun	104,7
		2. Rasio penyebaran penanaman modal keluar jawa	32,72 %	41,06 %	Meningkat 8,34
		3. Rasio penanaman modal PMDN terhadap PMA	40,87 %	43,35 %	Meningkat 2,48
2.	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran	Jumlah minat penanaman modal	9.000 minat penanaman modal	9.501 minat	105,6
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Waktu pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP:			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran penanaman modal • Izin usaha 	1 hari 7 hari	1 hari 5 hari	100 140
		2. Survey kepuasan pelayanan masyarakat	Meningkat	Meningkat	
4.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional	1. Jumlah daerah yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan perizinan penanaman modal secara elektronik (SPIPISE)	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	100
		2. Peringkat Negara Indonesia dibidang penanaman modal	Peringkat 44 (WEF)	Peringkat 46 (WEF)	
		3. Indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of doing business</i>)	Peringkat 9 At Kerney	Peringkat 9 A.t.Kerney	
		4. Indeks daya saing	Peringkat Ba1 Moody's -Fitch BB+ -Standard & Poor BB+	Peringkat Baa3 Moody's	

5.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil kajian penanaman modal yang berkualitas	1 RUPM 1 revisi Renstra 15 kajian	1 RUPM 1 revisi Renstra 18 kajian	100 100 120
6.	Meningkatnya kerjasama penanaman modal	1. Jumlah MoU kerjasama penanamam modal 2. Jumlah perjanjian/ kesepakatan kerjasama penanaman modal 3. Jumlah penjadohan (match making) UKM dengan PMA/PMDN	8 MoU 120 dokumen 33 UKM dengan PMA 104 UKM dengan PMDN	8 MoU 156 dokumen 16 UKM dengan PMA 104 UKM dengan PMDN	100 130 100
7.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Opini BPK	WTP	WTP	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 511.701.090.000,0 (100,00 %)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 456.643.409.432,0 (10,76 %)

Sisa Anggaran (Penghematan) : Rp 55.057.680.568,0 (89,24 %)